

PENATAUSAHAAN ASET TETAP DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Zulkifli^a, Yuli Antina Aryani^b, M.Fadhlan Gani^c

^a Politeknik Negeri Sriwijaya^{abc}

Zulkifliwancik@gmail.com^a, yuli_aa@polsri.ac.id^b, FadhlanGani@gmail.com^c

Abstract. *The purpose of this study was to determine how much influence the fixed asset administration and regional financial supervision had on the Palembang city government. The sample of this study amounted to 100 respondents in offices and agencies in the city of Palembang related to fixed asset administration and regional financial supervision which were processed using SPSS version 24 software. Statistical analysis used in this study was the research instrument test, classical assumption test, regression analysis. multiple linear, coefficient of determination, F test and t test. The results of this study indicate that the administration of fixed assets and regional financial supervision have an effect both partially and simultaneously on the quality of financial reports in the Palembang city government.*

Keyword: *Fixed Assets Administration, Regional Financial Supervision, Financial Report Quality*

1. Pendahuluan

Aset merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan, karena nilai aset akan memberikan sumbangan yang cukup besar dalam laporan keuangan (neraca). Sehingga dalam mengelola aset tidak boleh sembarangan dan harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ada. Dalam suatu pemerintahan pasti memiliki keberagaman data pencatatan aset yang menimbulkan suatu permasalahan dalam menertibkan atau menata dalam mengelola barang milik Negara/Daerah. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki suatu rangkaian atau bisa disebut juga penatausahaan aset tetap. Yang dimaksud penatausahaan aset tetap adalah suatu rangkaian atau susunan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku yang ditetapkan dalam aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016. Penatausahaan aset tetap ini memiliki tujuan sebagai dasar untuk menyusun neraca, merencanakan kebutuhan/pengadaan dan memelihara Barang Milik Daerah (BMD) dan digunakan untuk rencana anggaran dan mengadministrasikan BMD. Setiap pemerintah wajib melakukan penatausahaan aset demi ketertiban administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah.

Dalam hal melakukan menertibkan atau menata suatu barang milik Negara/Daerah pemerintah harus mengawasi jalannya suatu penatausahaan tersebut agar berjalan dengan efisien dan efektif. Sistem akan berjalan dengan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Menurut keputusan Presiden No 74 tahun 2001 Tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 16 menjelaskan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan per undang undangan yang berlaku.

Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Relevan artinya memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Andal antara lain penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Salah satu pencapaian pemerintah daerah terhadap laporan keuangan adalah diterimanya opini laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini laporan keuangan terdiri dari empat opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Opini

Tidak Wajar (TW). Berikut ini adalah opini yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Palembang terhadap laporan keuangannya sebagai berikut :

**Tabel 1 Perkembangan Opini BPK atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang**

No	Tahun	Opini
1.	2010	WTP
2.	2011	WTP
3.	2012	WTP
4.	2013	WTP-DPP
5.	2014	WTP
6.	2015	WTP
7.	2016	WTP
8.	2017	WTP
9.	2018	WTP
10.	2019	WTP
11.	2020	WTP

Sumber : Pemkot, Palembang

2. Tinjauan Pustaka

Pengertian Aset

Menurut PSAK No.16 Revisi Tahun 2011, menjelaskan bahwa aset adalah semua kekayaan atau harta yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai manfaat bagi setiap perusahaan atau badan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa aset merupakan suatu sumber daya yang dimiliki oleh orang, badan, dan perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Menurut Munawir, pengertian aset adalah sarana atau sumber daya yang memiliki nilai ekonomis yang membantu untuk perusahaan dalam hal perolehan dan nilai wajarnya harus di ukur secara objektif.

Suatu aset memiliki unsur – unsur yang menyusun sebuah aset yaitu:

1. Investasi/Penyertaan yaitu suatu aset yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan dari return yang didapat.
2. Aset Lancar adalah aset yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasional suatu perusahaan.
3. Aset Tetap adalah aset berwujud yang siap digunakan untuk membantu kegiatan operasional perusahaan bukan untuk dijual belikan.
4. Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang tidak berwujud yang bermanfaat dengan memberi hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya.
5. Aset Lainnya adalah aset yang tidak termasuk golongan atau unsur seperti

investasi/penyertaan, aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud.

Pengertian Aset Tetap

Menurut PSAK 16, pengertian aset tetap adalah sebagai aktiva tetap yang digunakan atau pengiriman barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak lain atau untuk keperluan administrasi dan yang harus digunakan lebih dari periode waktu tertentu. Menurut Reeve (2012:2) Aset tetap (fixed asset) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif bersifat permanen yang dapat digunakan dalam jangka panjang dan aset ini memiliki bentuk fisik. Dalam Kieso (2011:512) aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Aset yang digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual kembali. Hanya aset yang digunakan untuk kegiatan bisnis yang bisa disebut sebagai aset tetap. Sebagai contoh gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan tetapi jika gedung tersebut menganggur atau tidak pakai maka gedung tersebut bisa dipisahkan sebagai investasi.
2. Aset yang memiliki masa umur manfaat yang panjang dan disusutkan. Aset tetap memberikan manfaat untuk perusahaan lebih dari satu periode. Perusahaan juga akan mengeluarkan biaya perolehan aset tetap untuk periode mendatang sebagai biaya penyusutan periodik. Semua aset tetap akan mengalami penyusutan kecuali tanah. pengecualian tanah yang disusutkan tersebut hanyalah tanah yang mengalami penurunan nilai material, atau hilangnya kesuburan tanah dikarenakan oleh faktor tanah dan faktor cuaca.
3. Aset yang memiliki substansi secara fisik. Aset tetap harus memiliki bentuk yang nyata atau keberadaan fisiknya. Hal inilah yang membedakan dengan aset tetap dengan aset lainnya.

Klasifikasi Aset Tetap

Dalam Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07, aset tetap diklasifikasikan menjadi 6 akun yang dirincikan sebagai berikut :

1. Tanah
Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang bisa digunakan atau siap dipakai yang dimiliki oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah bisa juga digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Peralatan dan mesin
Peralatan dan mesin yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap yaitu mesin, kendaraan, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang kondisinya siap digunakan dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun.
3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap adalah semua gedung dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Termasuk jenis gedung dan bangunan antara lain : bangunan, gedung, monument, rambu – rambu, bangunan menara.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, irigasi dan jaringan yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap adalah semua jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki oleh pemerintah untuk digunakan sebagai kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap adalah aset yang memiliki definisi atau kriteria aset tetap tetapi tidak termasuk dari golongan lain. Contohnya koleksi buku dan barang seni.

6. Kontruksi dalam pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan yang tanggal neraca belum selesai dibangun sepenuhnya.

Penatausahaan aset tetap

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa tata usaha terdiri dari kata “tata” dan “usaha”. tata artinya aturan, kaidah, susunan, cara menyusun atau sistem dan arti dari Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran atau badan. Menurut Nawawi dan Martini, tata usaha adalah suatu kegiatan yang menghimpun, mencatat, mengadakan, menyimpan dan mengirim berbagai data informasi. Dan bermanfaat untuk mewujudkan tugas pokok organisasi. Dalam Pemendagri No.19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi serta pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pengelolaan aset penatausahaan menempati posisi yang sangat strategis karena segala kebijakan akan lebih efektif apabila digunakan berdasarkan data yang tepat yang bersumber dari kegiatan penatausahaan aset tersebut.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap merupakan suatu proses atas susunan kegiatan yang terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi serta pelaporan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

1. Pembukuan

Dalam Pemendagri No.19 tahun 2016 dijelaskan bahwa pembukuan merupakan kegiatan pencatatan barang milik daerah yang dimulai dari pencatatan ke daftar barang pengguna dan dilanjutkan pencatatan kedalam kartu inventaris barang serta daftar barang milik daerah tersebut. Setiap kuasa pengguna barang mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran serta pencatatan atas barang milik daerah masing-masing ke Daftar Barang pengguna / Daftar Barang Kuasa pengguna sesuai dengan pengolongan dan kodefikasi barang tersebut.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pembukuan merupakan suatu pencatatan atas barang milik daerah yang dimulai dari pencatatan barang milik daerah baik berupa seluruh aset maupun mutasi ke daftar pengguna barang, pencatatan hasil inventarisasi ke kartu inventarisasi barang serta ke daftar barang milik daerah, proses pencatatan ini bisa juga bisa berupa penghapusan aset tetap yang rusak ataupun hilang dan untuk aset tetap yang hilang dapat dilakukan reklasifikasi atas aset tetap yang ditemukan kembali setelah dinyatakan hilang.

2. Inventarisasi

Dalam Pemendagri No. 19 tahun 2016 dijelaskan bahwa inventarisasi merupakan kegiatan dalam proses pendataan, pencatatan serta pelaporan atas hasil dari pendataan barang milik daerah. Sugiana (2013:173) menjelaskan bahwa inventarisasi aset merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pendataan, pencatatan serta pelaporan atas hasil dari pendataan tersebut dan dapat didokumentasikan dengan baik untuk aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Inventarisasi aset ini dilakukan agar dapat terpenuhinya data-data yang diperlukan baik yang dimiliki serta dikuasai oleh perusahaan, instansi maupun organisasi.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi merupakan rangkaian proses yang dilakukan dengan mulai mengumpulkan data atas barang milik daerah dilanjutkan dengan proses pencatatan barang milik daerah dan terakhir dilakukan pelaporan atas seluruh aspek legalnya seluruh barang milik daerah atau aset tersebut.

3. Pelaporan

Dalam Pemendagri No.19 tahun 2016 dijelaskan bahwa kuasa pengguna barang mempunyai hak untuk melakukan pelaporan atas barang milik daerah dan pelaporan tersebut dapat dilakukan pada saat semesteran maupun tahunan kepada pengguna. Pengguna menyampaikan laporan pengguna sesuai periode yang digunakan kepada kepala daerah melalui pengelola. Pembantu pengelola bertugas mengumpulkan seluruh laporan pengguna sesuai dengan periode yang digunakan baik semesteran, tahunan maupun 5 tahunan dari setiap skpd yang ada serta untuk jumlah dan nilai yang dikumpulkan harus dibuat rekapitulasinya. Pelaporan sendiri dapat kita artikan sebagai proses dalam rangka menyusun sebuah laporan barang setiap masa periode yang digunakan baik setiap semester maupun setiap tahun dan dilakukan setelah kegiatan inventarisasi dan pencatatan dilakukan.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat kita simpulkan bahwa pelaporan merupakan proses dari yang dilakukan dalam kegiatan untuk menyusun suatu laporan barang pada setiap periode pelaporan setelah terlaksananya kegiatan inventarisasi serta kegiatan pencatatan atas barang milik daerah tersebut.

Pengawasan Keuangan Daerah

Undang-undang No.33 tahun 2004 mengatur kewajiban untuk pemerintah agar dapat mengelola keuangan daerah masing-masing dengan baik terkhusus untuk anggaran daerah serta atas realisasinya yang akan disajikan dalam APBD serta dalam laporan realisasi anggaran yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu diperlukannya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran dalam daerah masing-masing (Mardiasmo,2011). Pengawasan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui apakah perencanaan yang telah dibuat serta disusun oleh pemerintah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah sudah dilaksanakan dengan efektif serta efisien dan ekonomis pengawasan sesuai dengan keputusan presiden No.74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam PP No.41 tahun 2007 tentang perangkat daerah dijelaskan bahwa unsur pengawas

penyelenggara pemerintah daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam hal ini untuk urusan pengelolaan keuangan daerah adalah inspektorat daerah.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dalam proses pengelolaan anggaran di daerah masing-masing agar setiap proses perencanaan yang telah disusun pemerintah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pengawasan keuangan daerah sangat diperlukan dimasing-masing daerah agar dapat pengelolaan anggaran dapat terealisasi dengan baik.

Kualitas Laporan Keuangan

Dalam PP No.71 tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang telah dibuat dengan sistematis pelaporan yang berisi tentang posisi keuangan serta berbagai transaksi yang ada dalam satu entitas pelaporan tertentu. Kasmir (2012:7) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan kondisi dari keuangan suatu instansi daerah atau perusahaan dalam periode pelaporan.

Halim Abdul (2007) Menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan kewajiban dari suatu daerah yang merupakan kekayaan daerah tersebut sepanjang belum dimiliki maupun dikuasai oleh Negara yang mempunyai kuasa lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang, barang maupun aset lainnya. Sedangkan Kualitas dapat diartikan sebagai bentuk konsistensi atas standar yang berlaku serta diukur berdasarkan kadar ketidaksesuaian dan hasil capaian yang diukur melalui pemeriksaan agar dapat terlihat telah memenuhi segala standar yang berlaku agar dapat dikatakan berkualitas Iman Mulyana (2010:96).

Dalam PP No.71 tahun 2010 , Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan standar normatif yang harus diwujudkan dalam akuntansi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berikut adalah karakteristik yang merupakan prasyarat normatif atas laporan keuangan agar dapat memenuhi standar kualitas yang diinginkan :

1. Relevan, Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pengguna dalam evaluasi serta mengoreksi evaluasi dimasa lalu.
2. Andal, Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila tidak mengandung informasi yang dapat menyesatkan dan terdapat kesalahan material tapi disajikan dengan jujur menurut fakta yang ada dan dapat diverifikasi kebenarannya.
3. Dapat dibandingkan, Laporan Keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya.
4. Dapat dipahami, Laporan keuangan harus dapat dipahami dengan mudah oleh para pengguna laporan keuangan sesuai dengan batas pemahaman dari para pengguna laporan keuangan tersebut.

3. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kuantitatif. Peneliti menganalisis hubungan antara penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Penatausahaan aset tetap dan pengawasan merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya. Sedangkan kualitas laporan keuangan merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibatnya.

Populasi didalam penelitian ini adalah menggunakan instansi yaitu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sebagai unit penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai responden untuk melakukan pencarian data secara primer. Jumlah OPD yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 29 OPD di Kota Palembang yang terdiri dari badan dan dinas berdasarkan data yang dimuat pada situs palembang.go.id.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan *Sampling purposive* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu” (sugiyono, 2019:133). Pemilihan OPD dalam penelitian ini dilakukan secara random karena keterbatasan waktu penelitian, perizinan penelitian serta wabah pandemi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini adalah menggunakan data pertama kali dicatat/data yang pertama kali didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti. Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang sudah disiapkan secara tertulis, menanyakan secara langsung (wawancara) dan melihat hasil pengamatan terhadap orang yang sudah menjadi sampel penelitian.

Model penelitian ini menggunakan Persamaan umum regresi linier berganda yaitu :

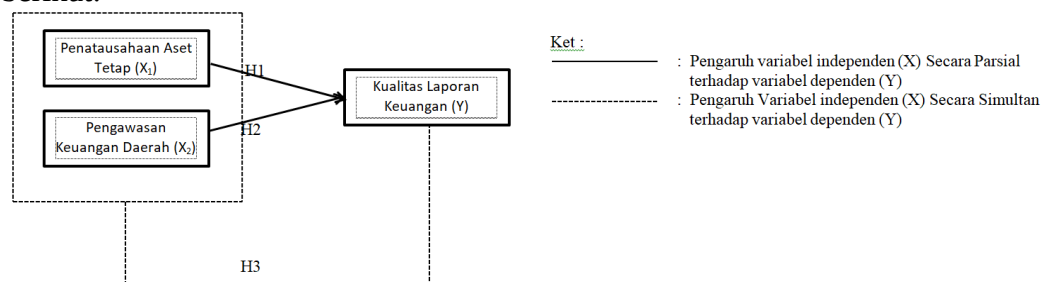
$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X₁= Penatausahaan Aset Tetap

X₂= Pengawasan Keuangan Daerah

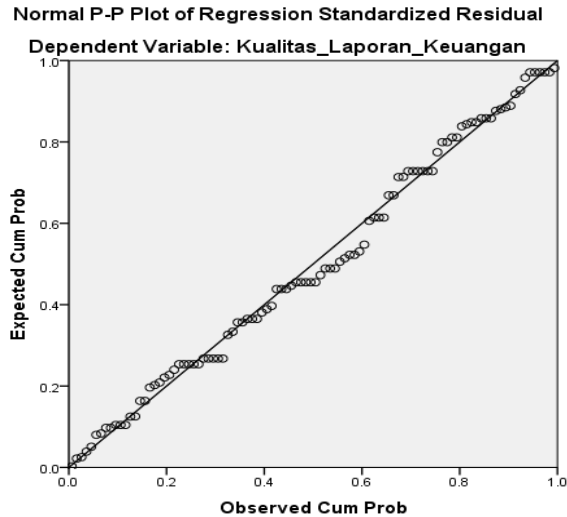
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis akan mengembangkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



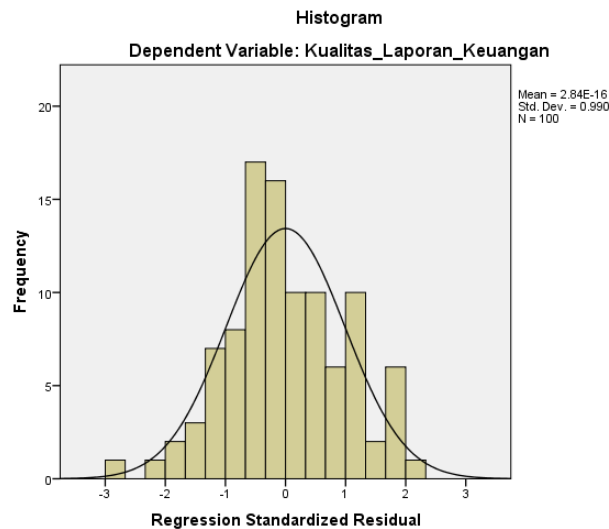
Gambar 1 Kerangka Pemikiran

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan analisis grafik dan analisis statistik. Analisis statistik dilakukan dengan mengamati sebaran plot pada grafik *P-P Plot* dengan ketentuan jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Analisis menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov Test* untuk menentukan normalitas distribusi residual jika $Asymp.Sig(2-tailed) > (0.05)$, maka data berdistribusi secara normal.



Gambar 2 Kolmogorov-Smirnov Test



Gambar 3 Hasil Histogram

Tabel 2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.11733904
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.046
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Output SPSS diolah (2021)

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p value) atau nilai *asympt.sig.(2-tailed)* residual dalam penelitian ini memiliki nilai 0,200. Karena nilai lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka nilai residual tersebut telah normal

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Metode uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.601	4.242		1.556	.123		
	Penatausahaan_Aset Tetap	.467	.114	.399	4.112	.000	.593	1.687
	Pengawasan_Kuangan Daerah	.467	.130	.348	3.590	.001	.593	1.687

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Output SPSS diolah (2021)

Hasil perhitungan tolerance menunjukkan ketiga variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk menguji heterokedastisitas yaitu menggunakan uji *Spearman Rho*.

Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Correlations					
			Unstandar- dized Residual	Penatausah- aan_Aset_ Tetap	Pengawasan _Keuangan_ Daerah
Spearman's rho	Unstandar- dized Residual	Correlation Coefficient	1.000	.087	.036
		Sig. (2-tailed)	.	.389	.725
		N	100	100	100
	Penatausah- aan_Aset_ Tetap	Correlation Coefficient	.087	1.000	.595**
		Sig. (2-tailed)	.389	.	.000
		N	100	100	100
	Pengawas- an_Kuang- an_Daerah	Correlation Coefficient	.036	.595**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.725	.000	.
		N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS diolah (2021)

Pada tabel diatas menunjukan bahwa tidak adanya variabel yang terjadinya heterokedastisitas dikarenakan nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan metode enter, karena dengan metode enter seluruh variabel akan dimasukkan dalam analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5 Hasil Analisis Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.601	4.242		1.556	.123
	Penatausahaan_Aset_ Tetap	.467	.114	.399	4.112	.000
	Pengawasan_Kuang- an_Daerah	.467	.130	.348	3.590	.001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Output SPSS diolah (2021)

Diperoleh model persamaan regresi berganda yaitu :

$$Y = 6.601 + 0,467X_1 + 0,467X_2 + e$$

Y : Kualitas Laporan Keuangan
X1 : Penatausahaan Aset Tetap
X2 : Pengawasan Keuangan Daerah
e : Error

dari persamaan regresi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- Dari nilai konstanta regresi sebesar 6,601 menunjukan bahwa tidak ada perubahan variabel penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan, maka kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Palembang sebesar 6,601.
- Pada X1 (penatausahaan aset tetap) koefisien regresi sebesar 0,467 menunjukan bahwa variabel penatausahaan aset tetap (X1) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y)

- X2 (pengawasan keuangan daerah) koefisien regresi sebesar 0,467 menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah (X2) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y).
- Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh variabel penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada output *Model Summary* dari hasil analisis regresi berganda

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.677 ^a	.458	.447	3.149
a. Predictors: (Constant), Pengawasan_Keuangan_Daerah, Penatausahaan_Aset_Tetap				

Sumber : Output SPSS diolah (2021)

Berdasarkan tabel tersebut, Menunjukkan hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan *R Square* sebesar 0,458. Hasil ini menunjukkan bahwa 45,8% variasi perubahan pada variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) dipengaruhi oleh variabel Penatausahaan Aset Tetap (X1) dan Pengawasan Keuangan Daerah (X2), sedangkan 54,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Uji Parsial (Uji T)

Pengujian secara parsial (uji t) terhadap masing-masing variabel independen yaitu penatausahaan Aset Tetap (X1) dan Pengawasan Keuangan Daerah(X2) dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah diajukan. Hasil *output* regresi dengan SPSS akan menunjukkan nilai t hitung dan signifikansinya. Untuk melihat signifikansi tiap variabel, maka dapat dilakukan dengan melihat dari nilai t hitung dan t tabel Setiap variabel X.

Tabel 7 Hasil Signifikansi Nilai t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.601	4.242		1.556	.123
	Penatausahaan_Aset_Tetap	.467	.114	.399	4.112	.000
	Pengawasan_Keuangan_Daerah	.467	.130	.348	3.590	.001
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan						

Sumber : Output SPSS diolah (2021)

- Variabel penatausahaan aset tetap (X1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4.112 lebih besar dari t_{tabel} 1.984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa penatausahaan aset tetap mempengaruhi kualitas laporan keuangan (H1) dapat diterima
- Variabel pengawasan keuangan daerah (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3.590 lebih besar dari t_{tabel} 1.984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa pengawasan keuangan daerah memengaruhi kualitas laporan keuangan (H1) dapat diterima

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen. Dalam pengujian simultan variabel independen yaitu penatausahaan aset tetap (X1) dan pengawasan keuangan daerah (X2). Ditentukan ketentuan bahwa jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis dapat diterima atau dengan kata lain seluruh variabel independen (X1 dan X2) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan (Y).

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	813.938	2	406.969	41.033	.000 ^b
	Residual	962.062	97	9.918		
	Total	1776.000	99			
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Daerah, Penatausahaan Aset Tetap						

Sumber : Output SPSS diolah (2021)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat nilai F_{hitung} adalah sebesar 41.033 dan signifikansi sebesar 0.000. hal tersebut mengindikasikan bahwa F_{hitung} sebesar 41.033 lebih besar dari 3.090, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan daerah secara bersama – sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang. Tingkat signifikan sebesar 0.000 kurang dari 0.05 atau 5 %.

Pembahasan

Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

Variabel penatausahaan aset tetap (X1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4.112 lebih besar dari t_{tabel} 1.984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel penatausahaan aset tetap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). yang artinya semakin tinggi nilai penatausahaan aset tetap di badan dan dinas kota Palembang, maka kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang akan semakin baik.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Variabel pengawasan keuangan daerah (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3.590 lebih besar dari t_{tabel} 1.984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). yang artinya semakin tinggi nilai pengawasan keuangan daerah dibadan dan dinas kota Palembang, maka kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang akan semakin baik.

Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Variabel penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan daerah memiliki nilai F_{hitung} adalah sebesar 41.033 dan signifikansi sebesar 0.000. hal tersebut mengindikasikan bahwa F_{hitung} sebesar 41.033 lebih besar dari 3.090, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan daerah secara bersama – sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang. Tingkat signifikan sebesar 0.000 kurang dari 0.05 atau 5 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- Penatausahaan Aset Tetap secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Palembang.
- Pengawasan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Palembang.
- Penatausahaan Aset Tetap dan Pengawasan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Palembang.

Saran

- Bagi Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan sebaik mungkin, khususnya dalam penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan daerah, maka dari itu diperlukan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam pengelolaannya, dengan mengadakan pelatihan bagi pengurus barang dalam melaksanakan penatausahaan aset tetap dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Bagi Pemerintah kota Palembang lebih meningkatkan kinerja pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset tetap.
- Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel penelitian lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti sumber daya manusia dan sistem informasi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan persentase total dari varians yang dijelaskan.
- Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan jenis pengumpulan datanya, tidak hanya menyebarkan kuesioner tetapi disertai juga interview

dengan kepala bagian dan staff pengurus barang yang berkaitan dengan penelitian.

6. Daftar Pustaka

- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA). Jilid 2. Sosial Politik dan Ekonomi* (Issue June). <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/konferensi-appptm-ke-7-meningkatkan-kualitas-dan-kuantitas-jurnal-ilmiah>
- Andiani, N. J., Hapsari, D. W., & Muslih, M. (2017). Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta). *E-Proceeding of Management*, 4(3), 2796.
- Anshari, E. S. (2016). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang (Effect of Management Goods Regional Property Of Quality Report of Finance Government of Padang). *Universitas Negeri Padang*, 4(1), 1–18.
- Azlan, M., Herwanti, T., & Pituringasih, E. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Kkuntansi, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3, 188–198.
- Daerah, K., Umum, a A., Keuangan, P., & Penatausahaan, B. P. (2006). *Penatausahaan keuangan daerah*.
- Daerah, P. (2020). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020*. 1280.
- Eliana, Nurhayati, & Muhammad. (2020). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh). *Journal of Economics Science*, 6(1), 1–11.
- Haza, I. I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawas Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 2–17.
- Maiti, & Bidinger. (1981). PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Martini, R., Arimbi, D. C., & Sari, K. R. (2020). Penatausahaan Aset Tetap untuk Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 223–228. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.009>
- Mawuntu, N. S., Manossoh, H., & Afandi, D. (2020). Pengaruh Kepatuhan Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 260. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28230.2020>
- Pada, S., Pendapatan, D., Kekayaan, D. A. N., Rami, M. R., Acct, B., & Si, M. (2014).

- Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh). *Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh)*, 4(17), 84–103.
- Pemerintah, P. (2014). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. *Undang - Undang No 32 Tahun 2004, 040501*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Poe, Y., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 159–169. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15356>
- Ramadhani, M., Soerono, A. N., & Mulyasari, W. (2019). PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PEMAHAMAN BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5244>
- Sholikah, R. N., Astuti, D. S. P., & Susnarko, M. R. (2016). Pengaruh Pegawai Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD kabupaten Boyolali). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(April), 168–175. https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/751/jbptunikompp-gdl-sansantrip-37523-1-unikom_s-l.pdf
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Welyoyo Rifurariani, Inggriani Elim, M. Y. B. K. (2020). Kualitas Laporan Keuangan dan faktor - faktor yang mempengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 87–91.
- Sugiyono.(2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA, cv.
- Kurniawan Robert dan Budi Yuniarto. (2018). Analisis Regresi: Dasar dan penerapannya dengan R. Depok : PRENADAMEDIA GROUP.